

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2008 merupakan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2006-2011. Penyusunan RKPD ini merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Depok Tahun 2006 – 2011, dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD dan hasil forum SKPD untuk jangka waktu satu tahun, yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah dan RKPD Provinsi Jawa Barat. Program dan kegiatan prioritas RKPD menjadi rujukan utama penyusunan RAPBD.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.1.1. Visi dan Misi Kota Depok

Visi Jangka Panjang Kota Depok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 14 tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan adalah ” **Depok Kota Pendidikan, Permukiman, Perdagangan dan Jasa, yang Relegius dan Berwawasan Lingkungan** ” . Sedangkan Visi Jangka Menengah Kota Depok berdasarkan RPJMD 2006-2011, adalah : ”**Menuju Kota Depok yang Melayani dan Mensejahterakan**”. Visi ini mempunyai dua makna utama; **Pertama : Melayani**, mengandung arti meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan penyediaan sarana dan prasarana bagi warga Depok dengan meningkatkan kemampuan lembaga dan aparatur pemerintahan dalam memberikan dan menyediakan barang-barang publik dengan cara-cara yang paling efisien dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah; **Kedua : Mensejahterakan**, mengandung arti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi ekonomi yang dapat memberikan lapangan pekerjaan dan kehidupan bagi masyarakat banyak dan juga keuangan daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi melayani dan mensejahterakan tersebut telah dirumuskan 4 (empat) misi Pemerintah Kota Depok, yaitu :

- Pertama,** Mewujudkan **Pelayanan** yang ramah, cepat dan transparan;
- Kedua,** Membangun dan mengelola **Sarana dan Prasarana Infrastruktur** yang cukup, baik dan merata;
- Ketiga,** Mengembangkan **Perekonomian masyarakat, Dunia usaha dan Keuangan daerah;**
- Keempat,** Meningkatkan **Kualitas Keluarga, Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat** berlandaskan nilai-nilai agama.

1.1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok disusun berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
- b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- h. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- k. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2008;
- s. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok tahun 2000-2010;
- t. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan (POLDAS) Kota Depok tahun 2002-2012;
- u. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2006-2011;
- v. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri No.0008/M.PPN/01/2007;050/264A/SJ; tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2007.

1.2 GAMBARAN UMUM TERKINI KOTA DEPOK

1.2.1. Kondisi Geografis

Kota Depok terletak di bagian Utara Provinsi Jawa Barat, yang secara geografis terletak pada koordinat : 6° 19' 00"-6° 28' 00" Lintang Selatan dan 106° 43' 00"-106° 55' 30" Bujur Timur. Bentang alam Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50-140 meter di atas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Kota Depok memiliki luas sekitar 200,29 km² atau 0,58% dari luas Provinsi Jawa Barat, berbatasan dengan 3 (tiga) Kabupaten/Kota dan 2 (dua) Provinsi yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Propinsi Banten dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

Kondisi topografi berupa dataran rendah bergelombang dengan kemiringan lereng yang landai menyebabkan masalah banjir di beberapa wilayah, terutama kawasan cekungan antara beberapa sungai yang mengalir dari Selatan menuju Utara: Kali Angke, Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan dan Kali Cikeas.

Dalam konstelasi wilayah Jakarta – Bogor – Depok – Tangerang – Bekasi (Jabodetabek), Kota Depok merupakan wilayah penyangga bagi Ibukota Negara Republik Indonesia DKI Jakarta, sekaligus menjadi wilayah antara (*buffer zone*) dari kawasan resapan air (di daerah Selatan, seperti Kawasan Bogor dan sekitarnya) dengan kawasan perkotaan (di sebelah Utara, seperti DKI Jakarta). Dengan fungsi sebagai daerah penyangga sekaligus sebagai daerah resapan air, pola pemanfaatan ruang dan lahan di Kota Depok diamanatkan untuk memperhatikan perbandingan antara luasan kawasan budidaya dengan kawasan lindung. Selain sebagai daerah penyangga, Kota Depok juga merupakan *counter-magnet* bagi DKI Jakarta. Sebagai *counter magnet*, aktivitas yang tumbuh dan berkembang di Kota Depok sedikit banyak merupakan kegiatan perkotaan dan sebagian besar bertumpu pada ketersediaan infrastruktur regional yang menghubungkan Kota Depok dengan kota-kota lain di sekitarnya.

Hingga tahun 2005, pola guna lahan di Kota Depok didominasi oleh perumahan dan kampung (44,31%), diikuti oleh kegiatan tegalan/ladang/kebun/tanah kosong (35,34%), dan kawasan sempadan (5,85%). Penggunaan lahan yang berupa kawasan lindung, seperti hutan maupun sungai/danau, masing-masing hanya mencapai 0,13% dan 0,84% dari total luas wilayah Kota Depok.

Tabel 1.1. Jenis Penggunaan Lahan Kota Depok Tahun 2005

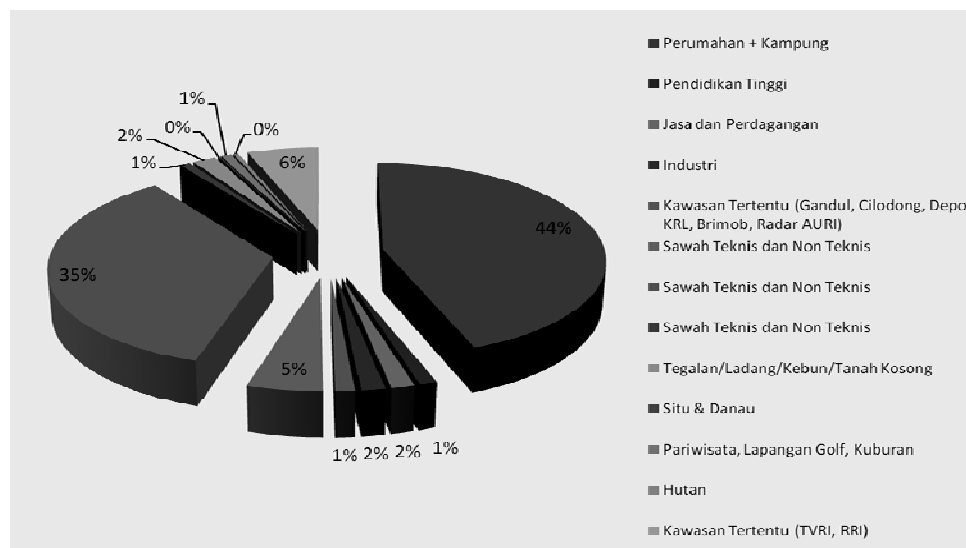
Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
Kawasan Terbangun	10,013.86	49.77%
Perumahan + Kampung	8,915.09	44.31%
Pendidikan Tinggi	231.39	1.15%
Jasa dan Perdagangan	301.28	1.50%
Industri	310.45	1.54%
Kawasan Tertentu (Gandul, Cilodong, Depo KRL, Brimob, Radar AURI)	255.65	1.27%

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
Ruang Terbuka Hijau	10,106.14	50.23%
Sawah Teknis dan Non Teknis	972.55	4.83%
Tegalan/Ladang/Kebun/Tanah Kosong	7,110.10	35.34%
Situ & Danau	169.68	0.84%
Pariwisata, Lapangan Golf, Kuburan	389.99	1.94%
Hutan	26.29	0.13%
Kawasan Tertentu (TVRI, RRI)	177.88	0.88%
Sungai	81.65	0.41%
Garis Sempadan (Sungai, Tegangan Tinggi, Pipa Gas)	1,178.00	5.85%
Total	20,120.00	100.00%

Sumber: Hasil Revisi RTRW Kota Depok Tahun 2000 – 2010, BAPEDA Kota Depok

Secara diagramatis, pola penggunaan lahan di Kota Depok hingga tahun 2005 dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.1 Persentase Guna Lahan Kota Depok Tahun 2005



Sumber: Hasil Revisi RTRW Kota Depok Tahun 2000 – 2010, BAPEDA Kota Depok, Diolah.

1.2.2. Kondisi Demografi

Berdasarkan data BPS Kota Depok, pada tahun 2006 penduduk Kota Depok berjumlah 1.420.480 jiwa, meningkat signifikan dibanding jumlah penduduk pada tahun 2005 yang berjumlah 1.374.522 jiwa, dengan demikian jumlah penduduk mengalami kenaikan sejumlah 45.958 jiwa atau dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 3,44 persen dari tahun sebelumnya.

Jika diklasifikasikan menurut jenis kelamin, dari total 1.420.480 jiwa penduduk Depok terdapat 700.511 jiwa atau 49,32 persen penduduk perempuan dan 719.969 jiwa atau 50,68 persen penduduk laki-laki, dengan rasio jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah 102 : 100 yang menunjukkan terdapatnya 102 laki-laki pada setiap 100 orang perempuan. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kota Depok lebih banyak dibandingkan perempuan. Kondisi ini berbeda dengan penduduk Indonesia secara umum yang lebih didominasi oleh penduduk perempuan.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan struktur usia di kota Depok pada Tahun 2006 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia Di Kota Depok Tahun 2006

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki+Perempuan		RJK
	N	%	N	%	N	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
0-4	45,727	6.35	43,570	6.2197	89,297	6.29	104.95
5-9	62,858	8.73	59,264	8.4601	122,122	8.60	106.06
10-14	79,144	10.99	74,546	10.642	153,690	10.82	106.17
15-19	62,363	8.66	61,290	8.75	123,653	8.71	101.75
20-24	61,354	8.52	69,828	9.97	131,182	9.24	87.86
25-29	74,241	10.31	85,754	12.24	159,995	11.26	86.57
30-34	80,665	11.20	81,803	11.68	162,468	11.44	98.61
35-39	71,955	9.99	64,388	9.19	136,343	9.60	111.75
40-44	56,332	7.82	49,180	7.02	105,512	7.43	114.54
45-49	42,113	5.85	36,712	5.24	78,825	5.55	114.71
50-54	29,816	4.14	25,718	3.67	55,534	3.91	115.93
55-59	20,287	2.82	17,546	2.50	37,833	2.66	115.62
60-64	14,351	1.99	12,075	1.72	26,426	1.86	118.85
65-69	9,723	1.35	8,434	1.20	18,157	1.28	115.28
70-74	5,254	0.73	5,718	0.82	10,972	0.77	91.89
75 +	3,786	0.53	4,685	0.67	8,471	0.60	80.81
JUMLAH	719,969	100.00	700,511	100.00	1,420,480	100.00	102.78

Sumber : Kota Depok Dalam Angka 2006

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk berdasarkan struktur usia yang paling dominan adalah kelompok usia 30 sampai dengan 34 tahun sejumlah 162.468 jiwa atau sebesar 11,44 persen, diikuti oleh kelompok usia 25 sampai dengan 29 tahun sejumlah 159.995 jiwa.

Selanjutnya terdapat 365.109 jiwa atau 25,70 persen penduduk yang termasuk kelompok usia belum produktif secara ekonomi (0-14 tahun). Pada kelompok usia 0-14 tahun ini, laki-laki lebih banyak dibanding perempuan sehingga rasio jenis kelaminnya menunjukkan lebih dari seratus, tepatnya 105, 83. Untuk kelompok usia produktif (15-64 tahun) terdapat 1.071.771 orang atau 71,65 persen dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,82, sedangkan penduduk yang dianggap sudah tidak produktif lagi yaitu berumur 65 tahun keatas, yaitu sebanyak 37.600 orang atau 2,65 persen. Berbeda dengan kelompok umur 0-14 tahun dan 15-64 tahun, pada kelompok penduduk usia 65 tahun ke atas perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, sehingga rasio jenis kelamin untuk penduduk kelompok umur ini menunjukkan angka kurang dari seratus yakni 99,61. Lebih besarnya jumlah atau persentase penduduk perempuan dari laki-laki pada kelompok 65 tahun ke atas ini menunjukkan angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki.

Hingga akhir tahun 2010 diproyeksikan jumlah penduduk Kota Depok mencapai 1.732.642 jiwa, dengan penduduk terbanyak diperkirakan ada di Kecamatan Cimanggis. Sedangkan hingga tahun 2015 diperkirakan jumlah penduduk Kota Depok mencapai 2.035.293 jiwa.

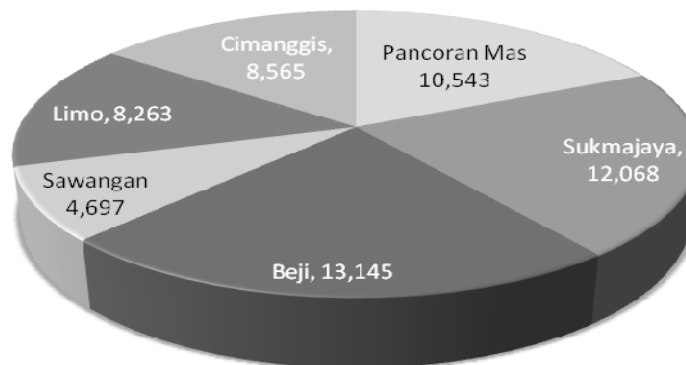
Tabel I.3 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2010 – 2015 (jiwa)

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
	2010	2015
Pancoran Mas	310,717	350,660
Sukmajaya	398,265	478,226
Beji	179,189	220,854
Sawangan	207,523	249,189
Limo	182,989	217,526
Cimanggis	451,925	515,111
TOTAL	1,732,642	2,035,293

Sumber: Hasil Revisi RTRW Kota Depok Tahun 2000 – 2010, BAPEDA Kota Depok, Diolah.

Ditinjau dari tingkat kepadatannya, Kecamatan Beji dan Sukmajaya diperkirakan akan menjadi kecamatan terpadat di Kota Depok. Kondisi saat ini, kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Beji (10.041 Jiwa/Km²), kemudian Kecamatan Sukmajaya (9.204 Jiwa/Km²) dan Kecamatan Pancoranmas (8.541 Jiwa/Km²). Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Sawangan, dengan tingkat kepadatan mencapai 3.639 Jiwa/Km².

Gambar 1.2 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Depok Tahun 2010 (Jiwa/Km²)



Sumber: Hasil Revisi RTRW Kota Depok Tahun 2000 – 2010, BAPEDA Kota Depok, Diolah.

Jumlah penduduk kota yang terus bertambah berbanding lurus dengan kompleksitas masalah kependudukan yang harus diantisipasi oleh Pemerintah Kota. Salah satu aspek penting dari masalah kependudukan adalah masalah pendidikan, mengingat pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan. Banyaknya penduduk yang mendapatkan pendidikan di sekolah merupakan salahsatu indikator tersedianya tenaga terdidik yang diprediksi dapat bersaing memasuki pasar kerja atau menciptakan lapangan kerja baru.

Berdasarkan data pada tahun 2005, penduduk Kota Depok 10 tahun ke atas yang tidak punya ijazah adalah sebanyak 117.483 orang atau 10,14 persen, tamat SD/MI/Sederajat sebanyak 259.644 orang atau 22,41 persen, tamat SLTP/MTs/Sederajat sebanyak 203.452 orang atau 17,56 persen, tamat SMU/MA/Sederajat sebanyak 285.134 orang atau 24,61 persen, tamat SM Kejuruan sebanyak 112.037 orang atau 9,67 persen dan tamat Diploma I sampai dengan Universitas sebanyak 180.859 orang atau 15,61.

Di Kota Depok terdapat 10 (sepuluh) sektor ekonomi yang dapat dijadikan lapangan usaha penduduk, yaitu :

- a. Sektor Pertanian,
- b. Sektor Pertambangan dan Penggalian,
- c. Sektor Industri,
- d. Sektor Listrik, gas dan air,
- e. Sektor Konstruksi,
- f. Sektor Perdagangan,
- g. Sektor Transportasi dan Komunikasi,
- h. Sektor Keuangan, dan

- i. Jasa-jasa
- j. Lainnya.

Jika dilihat dari penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor di atas, mayoritas penduduk di Kota Depok pada tahun 2005 bekerja di sektor jasa-jasa (29,14 %), kemudian di sektor perdagangan (27,79%), di sektor industri (15,14%), di sektor transportasi dan komunikasi (8,63%), dan sisanya tersebar di berbagai sektor, seperti: sektor konstruksi (6,35%), di sektor keuangan (10,05 %), di sektor pertanian (1,44 %), di sektor listrik, gas dan air (0,82 %), dan yang paling kecil persentasenya adalah di sektor pertambangan dan penggalian, yaitu hanya sebesar 0,55 persen.

Jika dilihat dari persentase jenis kelamin menurut lapangan usaha, terlihat bahwa untuk sektor jasa-jasa, persentase perempuan mencapai 37,53 persen, lebih tinggi daripada laki-laki yang hanya sebesar 25,13 persen. Lapangan usaha di sektor ini lebih banyak diminati oleh perempuan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Demikian pula di sektor perdagangan, persentase perempuan mencapai 33,92 persen dan laki-laki hanya sebesar 24,87 persen. Sektor ini banyak diminati oleh perempuan, karena dapat bekerja sambil mengurus rumah tangga.

Tabel I.4. Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha di Kota Depok, Tahun 2005.

Lapangan Usaha			
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (%)
1	2	3	4
Pertanian	1.99	0.28	1.44
Pertamb. & Penggalian	0.67	0.28	0.55
Industri	14.27	16.96	15.14
Listrik, Gas & Air	1.08	0.28	0.82
Konstruksi	8.57	1.70	6.35
Perdagangan	24.87	33.92	27.79
Angkutan & Komunikasi	11.82	1.98	8.63
Keuangan	11.47	7.07	10.05
Jasa-jasa	25.13	37.53	29.14
Lain-lain	0.13	-	0.09
JUMLAH	100.00	100.00	100.00

Sumber: Inkesra Kota Depok 2006

Selanjutnya jika dilihat dari jenis pekerjaan pada pekerjaan utama penduduk Kota Depok, maka nampak bahwa mayoritas penduduk di Kota Depok pada tahun 2005 bekerja pada jenis pekerjaan tenaga produksi sebesar 29,91 persen, kemudian pada

jenis pekerjaan tenaga usaha penjualan sebesar 20,23 persen, pada jenis pekerjaan pejabat pelaksana dan tenaga usaha sebesar 19,65 persen, pada jenis pekerjaan tenaga usaha jasa sebesar 18,92 persen, dan sisanya tersebar di berbagai jenis pekerjaan seperti pada jenis pekerjaan tenaga profesional sebesar 5,72 persen, pada jenis pekerjaan tenaga usaha pertanian sebesar 2,49 persen, jenis pekerjaan tenaga kepemimpinan dan manager hanya 2,35 persen, dan yang paling kecil persentasenya adalah yang bekerja pada jenis pekerjaan Anggota TNI dan lainnya yaitu hanya sebesar 0,73 persen.

Tabel 1.5 Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama di Kota Depok, Tahun 2005.

Lapangan Usaha	Laki-laki +
	Perempuan
1	2
Tenaga Profesional	5.72
Tenaga Kepemimpinan & Manager	2.35
Pejabat pelaksana & tenaga tata usaha	19.65
Tenaga Usaha Penjualan	20.23
Tenaga Usaha Jasa	18.92
Tenaga Usaha Pertanian	2.49
Tenaga Produksi	29.91
Anggota TNI & Lainnya	0.73
JUMLAH	100.00

Sumber Kota Depok Dalam Angka 2006

1.2.3. Potensi Unggulan Daerah

Kota Depok memiliki keunggulan komparatif, terutama letaknya yang sangat strategis berada pada poros Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Karakteristik wilayah Depok termasuk kategori perkotaan, akan tetapi masih terdapat sebagian kecil wilayah bercirikan perdesaan, terutama berada pada wilayah-wilayah di bagian Selatan Depok.

Meskipun merupakan wilayah perkotaan, Depok dikenal memiliki potensi unggulan daerah berupa komoditas *hortikultura* yang dikembangkan dengan konsep Pertanian Perkotaan, salah satunya adalah belimbing. Dalam setiap tahunnya produksi belimbing terus meningkat meskipun dihadapkan pada masalah terbatasnya kesediaan lahan. Tingginya produksi ini disebabkan oleh populasi tanaman yang terus bertambah dan produktivitas yang meningkat sebagai akibat introduksi ilmu pengetahuan dan teknologi budidaya. Minat berusaha tani belimbing meningkat dipicu oleh kuatnya daya serap pasar, harga yang relatif stabil dan margin laba yang cukup memadai. Kecocokan

agroklimat dan tersedianya varietas unggul menjadikan belimbing Depok memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dibandingkan belimbing dari daerah lain.

Pada tahun 2006, luas areal tanaman belimbing di Kota Depok mencapai 119,6 Hektar, dengan total produksi 3.208 ton. Jika dikonversikan ke dalam rupiah, omzet produksi belimbing Kota Depok mencapai Rp. 19 Milyar per tahun, meningkat sekitar 11,76% dari tahun 2005, yang hanya mencapai Rp. 17 Milyar.

Selanjutnya tanaman hias juga merupakan komoditas prospektif di Kota Depok, seiring dengan perkembangan kota dan meningkatnya jumlah permukiman yang membutuhkan tanaman-tanaman *landscaping* dan tanaman hias pekarangan yang diminati warga perkotaan. Komoditas tanaman hias yang menjadi unggulan Kota Depok adalah tanaman anggrek.

Dari tahun ke tahun perkembangan produksi tanaman hias di Kota Depok maju pesat, dan tersebar di hampir seluruh kecamatan, dengan luas pengembangan tanaman hias pada tahun 2006 mencapai 25 hektar dengan omzet per tahun mencapai 14 milyar.

Selain komoditas hortikultura juga dikembangkan komoditas perikanan, yaitu ikan hias. Hingga akhir tahun 2006, produksi ikan hias di Kota Depok mencapai 58.719.390 ekor, dengan nilai Rp. 34.064.072.400, tersebar di 6 (enam) kecamatan di Kota Depok. Saat ini, pasar ikan hias (lokal, regional dan ekspor) cukup terbuka dan menjadikan usaha tani ikan hias berkembang dan diminati masyarakat.

1.3. TUJUAN DAN FUNGSI

1.3.1 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2008 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar urusan pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan.

1.4. Fungsi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok berfungsi sebagai :

1. Pedoman bagi SKPD Kota Depok dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Tahun 2008;
2. Pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Depok tahun 2008;
3. Arahan dalam menjamin kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen dalam pembangunan daerah.

1.4. PENDEKATAN DALAM PENYUSUNAN RKPD

Dalam penyusunan RKPD Kota Depok, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu:

- a. Pendekatan pemerintahan dan politik, yaitu merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan berdasarkan RPJMD, kebijakan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pokok-pokok pikiran DPRD;
- b. Pendekatan teknokratik, yaitu pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah yang diawali dari perumusan isu kebijakan sampai dengan formulasi kebijakan (program pembangunan daerah);
- c. Pendekatan partisipatif (*participatory planning*), yaitu pendekatan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan melalui proses penjangkaran aspirasi masyarakat.

1.5. SISTEMATIKA

RKPD Kota Depok Tahun 2008, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan Visi dan Misi Kota Depok dan landasan hukum RKPD.

1.2. Gambaran Umum Terkini Kota Depok

Menjelaskan Kondisi Geografis, Kondisi Demografi, Potensi Unggulan Daerah,

1.3. Tujuan dan Fungsi

Menjelaskan tujuan dan fungsi RKPD.

1.4. Pendekatan dalam Penyusunan RKPD

Menjelaskan pendekatan dalam penyusunan RKPD, secara pemerintahan dan politik, teknokratik dan partisipatif.

1.5. Sistematika

Menjelaskan isi bahasan tiap bab dalam RKPD.

BAB II. EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Menjelaskan rumusan evaluasi umum pembangunan daerah dengan menguraikan capaian indikator kesejahteraan rakyat dan capaian kinerja program strategis tahun 2008.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH, ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis pembangunan daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Menjelaskan rumusan prioritas pembangunan, indikasi program, sasaran program, indikasi kegiatan, lokasi, sumber dana dan pelaksana kegiatan.

BAB V. KERANGKA ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan kondisi keuangan daerah dari berbagai sumber dana dan kebijakan pemerintah daerah yang dalam hal pendapatan, belanja, dan pembiayaan pembangunan daerah.

BAB VI. PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan RKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh SKPD dan pelaku pembangunan lainnya.

BAB II**EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2006**

Untuk menentukan rumusan perencanaan tahun 2008 diperlukan evaluasi terhadap capaian kinerja indikator makro Kota Depok Tahun 2006 dan identifikasi terhadap isu strategis di tahun 2007, yang harus diselesaikan pada tahun 2008.

1.2. CAPAIAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Untuk mengetahui perkembangan pembangunan daerah dapat dianalisis trend capaian indikator kesejahteraan rakyat (Inkesra) dari tahun ketahun. Capaian inkesra ini sebagai hasil dari intervensi program pembangunan dan partisipasi aktif seluruh stakeholders kota. Perkembangan Inkesra Kota Depok tahun 2003-2005 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel II.2. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Depok tahun 2003-2005

No.	Indikator	Satuan	Tahun			Keterangan
			2003	2004	2005	
1.	IPM		76,13	76,85	77,81	
	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,96	72,17	72,97	
	Angka Melek Huruf	%	96,90	97,16	97,98	
	Rata Lama Sekolah	Tahun	9,8	10,18	10,61	
	Daya Beli	PPP (Rp.000)	575,85	579,30	579,52	
2	KEPENDUDUKAN					
	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.369.522	1.415.505	1.420.480	
	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	3,44	3,36	3,44	
	Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km	6.342	7.046	7.092,12	
3	KESEHATAN					
	AKB (Angka Kematian Bayi)	/1000 lahir hdp	33,38	29,28	27,17	
	AKI (Angka Kematian Ibu)	Jml kematian ibu % thdp jmlhpersalinan	13	8	1,7	CFR (Case Fatality Rate)
	Angka Kesakitan		0,04	0,05		
	- DBD	%	0,9	2,8		
	- Diare	%	1,8	2,6		
	- ISPA	%	0,051	0,071		

	- TB Paru	%	47,47	64		
	- Filariasis	Kasus klinis	4	8		
4	KETENAGAKERJAAN					
	Angkatan Kerja	Jiwa	545.735	555.751	617.288	
	- Bekerja	Jiwa	459.532	487.327	521.220	
	- Mencari Pekerjaan	Jiwa	86.203	68.424	96.068	
	Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	532.668	533.825	515.284	
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	15,79	12,31	15,56	
5	EKONOMI					
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,35	6,44	6,93	
	PDRB atas dasar harga konstan) **	Rp. (juta)		4.433.822,90	4.740.868,66	
	PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku)**	Rp. (juta)		6.314.197,60	7.521.594,21	
	Gini Ratio		0,281	0,3141	0,199	
6	POLA KONSUMSI					
	Rata Pengeluaran Bln/kapita	Rp.	366.292	450.020	516.755	
	Pengeluaran Untuk Golongan Makanan	%	44,24	42,27	38,30	
	Pengeluaran Untuk Golongan Bukan Makanan	%	55,76	57,73	61,70	
7	KEMISKINAN					
	Jmlh Penduduk Miskin	Jiwa	65.000	64.000		Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) Rp. 162.352,-.
	% Penduduk Miskin	%	4,96	4,84		

* Sumber BPS 2006 & Inkesra 2006

** Sumber PDRB Kota Depok Tahun 2006

Berdasarkan capaian Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kota Depok tahun 2005 secara umum menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 77,81 (tahun 2005) meningkat dari 76,85 (tahun 2004) di atas rata-rata IPM Jawa Barat 69,35 dengan indikator penunjangnya, yaitu : Angka Harapan Hidup (AHH) mencapai 72,97 tahun; Rata-rata Lama Sekolah mencapai

10,61 tahun dan Angka Melek Huruf sebesar 97,98 %; Daya Beli (*Purchasing power parity*) sebesar 579,52.

Dalam bidang kesehatan, salah satu ukuran yang menunjukkan derajat kesehatan adalah angka kematian bayi (AKB) yang dihitung berdasarkan rasio jumlah bayi yang mati per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Untuk mengamati perkembangan peningkatan derajat kesehatan di Kota Depok, dapat diamati dari hasil perhitungan AKB, pada tahun 2003 mencapai 33,38, tahun 2004 mencapai 29,28 dan mengalami penurunan pada tahun 2005 sebesar 27,17 per 1000 kelahiran hidup. Penurunan ini cukup berarti, karena merupakan indikator yang menunjukkan semakin membaiknya derajat kesehatan ibu dan anak di Kota Depok.

Dalam bidang ekonomi, ditunjukkan oleh gini rasio yang menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan dari 40 % masyarakat yang berpenghasilan rendah, memperlihatkan angka pendapatan masyarakat relatif merata, atau tidak terjadi ketimpangan, yaitu dengan angka 0,199 di tahun 2005. Untuk indikator Pola Konsumsi, relatif tidak berubah yaitu konsumsi non-makanan masih lebih tinggi dibanding konsumsi makanan. Menurut teori, tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat bila pengeluaran untuk non-makanan melebihi 60%. Capaian Indikator Pola Konsumsi masyarakat Depok untuk golongan non-makanan mencapai 55,76 % pada tahun 2002, meningkat menjadi 61,70 % pada tahun 2005 yang sudah melewati angka 60%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat dan semakin membaiknya pemulihan/pertumbuhan ekonomi Kota Depok. Namun demikian pengeluaran masyarakat rata-rata per bulan baru mencapai Rp. 366.292,- pada tahun 2003 dan meningkat menjadi Rp. 516.755,- pada tahun 2005.

Hal yang masih memprihatinkan adalah angka kemiskinan dan pengangguran yang belum mampu diturunkan. Mengingat kompleksnya persoalan ini bukan hanya pada peran pemerintah, tetapi juga peran swasta perlu digalakkan untuk bersama pemerintah dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran ini.

2.2. CAPAIAN KINERJA PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2006

Indikator makro pembangunan daerah merupakan target capaian kinerja terukur selama satu tahun anggaran. Dalam kaitan dengan evaluasi indikator makro yang dijadikan bahan penyusunan RKPD Tahun 2008, masih menggunakan indikator makro sebagaimana tertuang dalam Renstra Kota Depok Tahun 2002-2006, mengingat tahun 2006 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra Kota Depok dan tahun pertama pelaksanaan Perda Kota Depok Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2006-2011.

Capaian indikator makro terdiri dari capaian kinerja 23 program strategis dengan 37 indikator sebagai berikut:

- (1) *Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama.*

Telah tersalurkan bantuan untuk peningkatan sarana dan prasarana peribadatan. Dari target 50 tempat ibadah, telah tercapai 90 tempat ibadah (180%). Selain itu telah terbina kader penyuluh keagamaan dari target 60 orang tercapai 75 orang (125%).

(2) *Program Pembangunan, Perbaikan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan.*

Telah tercapai target berkurangnya titik rawan kemacetan. Dari target 2 titik rawan kemacetan, telah terselesaikan 3 titik rawan kemacetan (150%), dengan lokasi Jl. Simpang Pengasinan Kecamatan Sawangan, Jl. Simpang Gandul Kecamatan Limo dan Jl. Simpang Kodim Kecamatan Pancoranmas.

Selain itu telah terlayannya Penerangan Jalan Umum (PJU), dari target 200 titik tercapai 200 titik (100%). Penerangan jalan umum tersebar di seluruh kecamatan, masing-masing terlayani sebanyak 30 jaringan, kecuali Kecamatan Cimanggung sebanyak 50 jaringan dan 20 jaringan dipasang di Jl. Raya Bogor.

(3) *Program Pembangunan, Perbaikan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.*

Telah berkurangnya lokasi rawan banjir. Dari target 1 lokasi tercapai 1 lokasi (100%), yaitu di kawasan SMU 5 Kecamatan Sawangan. Selain itu terpenuhinya kebutuhan pemakaian air irigasi dari target 1 lokasi tercapai 2 lokasi (200%), yaitu di Petak Tersier CB1 Ka. dan Petak Tersier Cte1 Ki Kelurahan Bojong Pondok Terong - Kec. Kecamatan Pancoran Mas dan Banjaran Pucung Cilangkap Sekunder Katulampa.

(4) *Program Pendidikan Dasar dan Menengah.*

Terlaksananya rehabilitasi atau pembangunan gedung sekolah dari target 120 unit, tercapai 223 unit sekolah (185,83%), terdiri dari :

- Bantuan keuangan untuk SD sebanyak 25 sekolah, MI sebanyak 28 sekolah, SMP sebanyak 10 sekolah, MTs sebanyak 1 sekolah, SMA sebanyak 10 sekolah, SMK sebanyak 10 sekolah dan MA sebanyak 1 sekolah, jadi jumlah keseluruhan bantuan keuangan untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dan MA sebanyak 85 sekolah.
- Role sharing untuk rehabilitasi SD/MI sebanyak 20 sekolah, MI sebanyak 9 sekolah, SMP sebanyak 9 sekolah, MTs sebanyak 6 sekolah.
- Role sharing untuk Ruang Kelas Baru (RKB) SMP sebanyak 12 sekolah sedangkan untuk MTs sebanyak 4 sekolah.
- Rehabilitasi SDN sebanyak 51 sekolah, RKB SDN sebanyak 11 sekolah dan SMAN 1 sebanyak 1 sekolah.
- Pembangunan SMAN 4 sebanyak 1 sekolah dan SMKN 1 sebanyak 1 sekolah.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk rehabilitasi SD sebanyak 11 sekolah dan MI sebanyak 2 sekolah.

Selain itu jumlah guru dan tenaga pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK yang dilatih dari target 100 orang, tercapai 730 orang (730%).

(5) *Program Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah.*

Program ini diorientasikan untuk menurunkan angka buta huruf di Kota Depok. Pada tahun 2006, telah bertambah masyarakat yang melek huruf sebanyak 1010 dari target 500 orang (202%). Sasarannya adalah warga masyarakat usia 15 – 44 tahun, tersebar di 6 kecamatan (di Kelompok Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat – PKBM).

Dalam hal penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJAR DIKDAS) 9 tahun, telah tercapai 95,80% dari target yang direncanakan, sebesar 94%. Data ini bersumber dari perhitungan jumlah anak usia sekolah WAJAR DIKDAS yang mengikuti pendidikan dasar, baik formal maupun non formal.

(6) *Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman*

Dari target tertatanya 3 kawasan kumuh, telah tertata 3 kawasan, yaitu Kampung Lio, Jl. H. Nurdin – Kel. Cipayung Jaya, dan Jl. Kencana - Kelurahan Kalimulya. Selain itu telah berkurangnya lokasi banjir di lingkungan pemukiman dari target 5 lokasi, tercapai 5 lokasi, yaitu di Jl. Lingkungan Nurul Huda – Kelurahan Tirtajaya, Jl. Lingkungan RW 5 Kelurahan Curug, Jl. Lingkungan RW 4 & 5 Kel. Kukusan, Jl. Lingkungan RT. 1 RW 02 Kel. Pangkalan Jati Baru, Jl. Muhidin/Qotrun Nada – Kelurahan Cipayung Jaya. Sedangkan dalam pengangkutan sampah telah tercapai realisasi 48,5% dari 47 % target yang ditetapkan.

Selanjutnya untuk pelayanan air bersih, dari target 16,7 % telah tercapai 18,27%, yang dilakukan melalui kerjasama dengan KPS Air Bersih Kota Depok. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih di beberapa wilayah rawan air bersih, telah dibangun Sumur Artesis di Kecamatan Sukmajaya sebanyak 2 unit, dan di Kelurahan Pengasinan - Kecamatan Sawangan sebanyak 2 unit.

(7) *Program Pengembangan Perdagangan dan Jasa.*

Telah meningkatnya penataan pasar tradisional dari target 1 unit, tercapai sebanyak 2 unit (200%) pasar yang ditata, yaitu Pasar Kemiri Muka dan Pasar Musi. Peningkatan pada Pasar Kemiri Muka berupa peningkatan jalan ruas barat, peningkatan jalan lingkungan dan lahan parkir. Peningkatan pada Pasar Musi berupa peningkatan jalan lingkungan dan lahan parkir, serta pengalihan kepemilikan kios los dari Pemilik kepada Pemerintah Kota Depok sebanyak 59 sertifikat.

(8) *Program Pemberdayaan Usaha.*

Dalam program ini telah terlatih dan terbina Pengusaha Industri Kecil dan Menengah dari target 100 orang, tercapai sebanyak 120 orang (120%).

(9) *Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan.*

Telah meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dari target 67 tahun tercapai 72,97 tahun (108,91%), berada di atas AHH Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 66,57.

(10) *Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja.*

Telah bertambahnya jumlah tenaga kerja yang terlatih dari target 60 orang, tercapai 60 orang (100%). Sedangkan pembinaan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja dari target 30 perusahaan, tercapai 30 perusahaan (100%).

(11) *Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.*

Dalam program ini telah terbina kelembagaan swadaya masyarakat dari target 120 orang, tercapai 132 orang (110,83%), terdiri dari 63 pengurus LPM tingkat kelurahan 63 orang perangkat kelurahan dan 6 orang pengurus LPM tingkat Kecamatan.

(12) *Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial.*

Telah menurunnya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial dari target 5 %, tercapai 13,5 %. Dengan sasaran Anak jalanan, gelandangan dan pengemis, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan wanita rawan sosial.

(13) *Program Peningkatan Prestasi Olahraga.*

Telah terbina atlet berprestasi dari target 30 atlet, tercapai 75 atlet (250%). Selain itu telah diselenggarakan kompetisi olahraga dari target 4 kegiatan, tercapai 5 kegiatan (125%) meliputi kompetisi Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA), PORSENI, POR Usia Dini, POR SMA dan POR SLTP.

(14) *Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kota.*

Dalam program ini telah meningkatkan jumlah Aparatur Pemerintah Kota Depok yang mengikuti *Diklat* dari target 170 orang, tercapai 226 orang (132,94%) baik diklat struktural maupun fungsional. *Tindak lanjut pengawasan*, dari target 40% tercapai realisasi 84%. *Pendapatan asli daerah (PAD)*, hanya mengalami kenaikan 4,93% dari target Perubahan APBD Tahun 2005 sebesar Rp. 64.060.869.668,97 menjadi RP. 67.218.328.356,49 pada realisasi APBD Tahun 2006. *Jumlah dokumen perencanaan*, tercapai target sejumlah 19 dokumen dari 5 dokumen yang direncanakan.

(15) *Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.*

Yang menjadi ukuran peningkatan kualitas pelayanan publik adalah jumlah pengaduan yang disampaikan melalui surat resmi kepada pemerintah kota. Selama tahun 2006 telah berkurang tingkat ketidakpuasan masyarakat dari target 140 pengaduan menjadi 132 pengaduan.

(16) *Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.*

Telah meningkatnya tindakan penegakan Perda dari target 10%, tercapai 19.21%. Meliputi kegiatan penertiban bangunan liar, penertiban pedagang kaki lima, penertiban PSK dan tempat hiburan serta penertiban ijin.

(17) *Program Peningkatan Administrasi Kependudukan.*

Dalam Rencana Strategis Kota Depok ditetapkan target 68% kepemilikan dokumen kependudukan. Selama tahun 2006 telah meningkat kepemilikan dokumen kependudukan, dari semula 700.991 jiwa di tahun 2005 menjadi 927.782 jiwa di tahun 2006 (90% dari target 1.030.869 jiwa) atau terlayani 226.791 jiwa, meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, Kartu keluarga serta KTP melalui upaya pelayanan dan penyuluhan. Selain itu untuk keluarga miskin pada tahun 2006 diberikan sebanyak 1260 akta kelahiran secara cuma-cuma.

(18) *Program Pengembangan Pertanian Perkotaan.*

Dalam program ini telah dikembangkan komoditas unggulan dari target 1 jenis, tercapai 1 jenis (100%) berupa pengembangan tanaman hias jenis anggrek di Kecamatan Sawangan.

(19) *Program Pengembangan Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah.*

Telah terlatihnya Pengusaha Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah dari target 60 orang, tercapai sebanyak 100 orang (160%) yang terdiri dari unsur pengusaha IKM yang tersebar di 6 kecamatan. Bentuk pelatihan yang diberikan (1) pelatihan CEFE (*Center Efficiency For Entrepreneur*), (2) Pelatihan Perbengkelan, (3) Pelatihan Pakaian Jadi, (4) Pelatihan Logam, (5) Pelatihan Kaca Petromax. Selain itu telah diberikan bantuan mesin kepada IKM sebanyak 15 buah mesin jahit serta 4 buah mesin rajut dan gulung benang.

(20) *Program Penataan dan Pengembangan Tata Ruang Kota.*

Dalam tahun 2006 telah tersusun 2 dokumen RRTR BWK dari target 2 kawasan yang ditetapkan (100%) yaitu dokumen teknis RRTR BWK 11 Tugu dan dokumen RRTR BWK IV Sukatani.

(21) *Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Telah menurunnya situ yang tercemar dari target 1 situ, tercapai 2 situ (200%), yaitu Situ Cilangkap dan Situ Bahar.

(22) *Program Penataan dan Pengembangan Pariwisata.*

Telah terpetakannya lokasi potensi wisata dari target 1 lokasi, tercapai 1 lokasi (100%), yaitu Situ Pengasinan.

(23) *Program Peningkatan Investasi Daerah.*

Telah meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok dari target 6,54%, tercapai 6,93%. Berdasarkan perhitungan PDRB harga konstan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Kota Depok tahun 2005 mengalami peningkatan dari tahun 2004, yaitu dari 6,41 persen pada tahun 2004 menjadi 6,93 persen pada tahun 2005, dan LPE tahun 2005 telah melampaui target yang direncanakan dalam RKPD tahun 2006 sebesar 6,54 Persen.

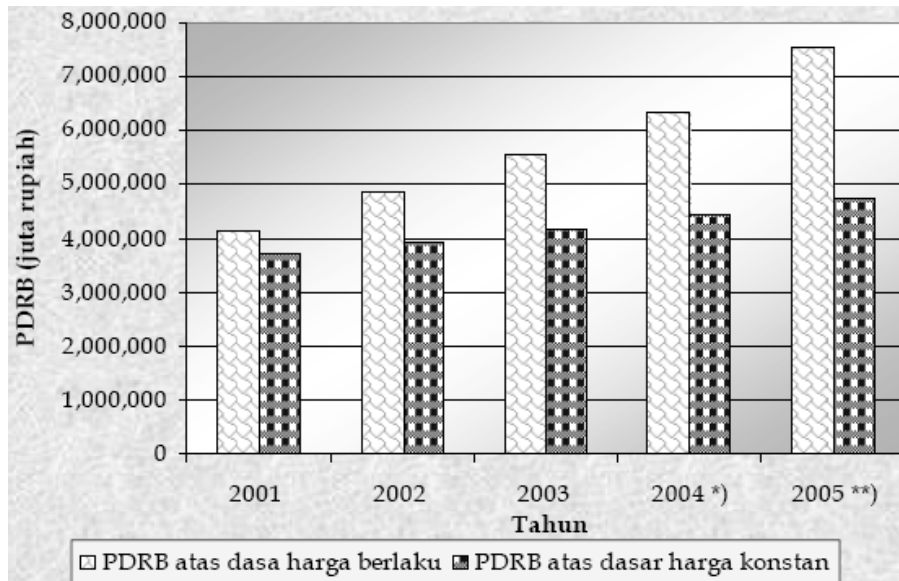
BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH, ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. KERANGKA EKONOMI DAERAH

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok tahun 2005 atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 19,12 persen dibanding tahun 2004, yaitu dari Rp. 6.314.197,60,- (dalam juta) pada tahun 2004 menjadi Rp. 7.521.594,61,- (dalam juta) pada tahun 2005(angka perkiraan). Sedangkan atas dasar harga konstan mengalami peningkatan sebesar 6,92 persen dari Rp. 4.433.822,90,- (dalam juta) tahun 2004 menjadi Rp. 4.740.868,66,- (dalam juta) tahun 2005. Ini menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian di Kota Depok mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

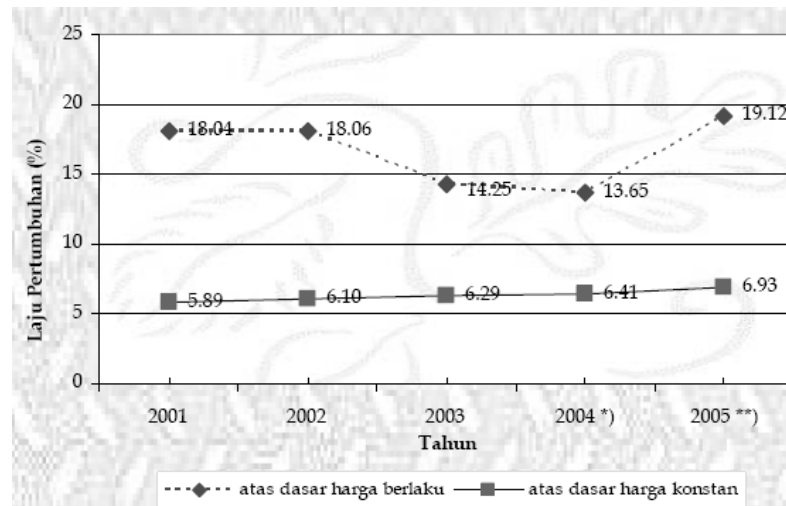
Gambar. 3.1. PDRB Kota Depok Tahun 2001-2005



Sumber: BPS Kota Depok, 2006

Berdasarkan perhitungan PDRB harga konstan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok tahun 2005 mengalami peningkatan, yaitu dari 6,41 persen pada tahun 2004 menjadi 6,93 persen pada tahun 2005, dan LPE tahun 2005 telah melampaui target yang direncanakan dalam RKPD tahun 2006 sebesar 6,54 Persen. Adapun *trend* peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Tahun 2001- 2005



Sumber: BPS Kota Depok, 2006

Dilihat dari kelompok sektor, semua kelompok mengalami peningkatan. Kelompok sektor yang mengalami peningkatan yang terbesar adalah kelompok sekunder (8,03 %) diikuti kelompok tersier (5,90 %) dan kelompok primer (4,70%).

Tabel 3.1. Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Menurut Sektor Tahun 2001 – 2005

KELOMPOK SEKTOR/SEKTOR	2001	2002	2003	2004 *)	2005 **)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A. PRIMER	3.04	3.58	2.23	4.24	4.70
01. PERTANIAN	3.04	3.58	2.23	4.24	4.70
02. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	-	-	-	-	-
B. SEKUNDER	6.78	7.60	6.88	6.94	8.03
03. INDUSTRI PENGOLAHAN	7.04	8.57	7.21	7.27	9.00
04. LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM	4.20	3.87	5.62	5.66	7.86
05. BANGUNAN/KONSTRUKSI	6.64	3.84	5.54	5.58	2.00
C. TERSIER	5.21	4.76	5.98	6.02	5.90
06. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	5.59	2.67	5.87	5.91	6.07
07. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	3.73	15.38	6.95	6.83	7.95
08. BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA	5.04	6.69	7.99	8.07	5.69
09. JASA-JASA	4.77	5.21	4.78	4.83	3.94
PDRB KOTA DEPOK	5.89	6.10	6.29	6.41	6.93

*) Angka Perbaikan

***) Angka Sementara

Sumber: BPS Kota Depok, 2006

Jika melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kota Depok atas dasar harga berlaku menunjukkan kenaikan dari Rp. 4.813.938,49 pada tahun 2004 menjadi Rp.5.554.989,46 pada tahun 2005 atau meningkat 15,39 %. Sedangkan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan naik dari Rp. 3.380.342,53 pada tahun 2004 menjadi Rp.

3.501.315,46,- pada tahun 2005 atau naik 3,58 persen. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan atau konsumsi penduduk Kota Depok juga mengalami peningkatan.

Untuk tahun 2008 LPE ditargetkan mencapai 6,47 dengan menggerakkan sektor-sektor potensial pada kelompok tersier, yang didukung oleh kelompok sekunder dan primer.

3.2. ISU STRATEGIS

3.2.1. Kemiskinan dan daya beli

Tingginya laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2006 sebesar 3,44 % yang tidak diimbangi dengan tingkat kompetensi (pendidikan dan keterampilan) yang memadai dan terbatasnya lapangan kerja, menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah keluarga miskin dan pengangguran. Selain itu migrasi dan kondisi ekonomi makro seperti inflasi yang tinggi, kenaikan harga dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) turut mempengaruhi peningkatan jumlah penduduk miskin di Kota Depok. Berdasarkan data BPS Kota Depok, pada tahun 2004 terdapat 65.000 jiwa orang miskin dan pada tahun 2005 terdapat 64.000 jiwa. Akan tetapi sebagai referensi, berdasarkan hasil pemetaan penduduk miskin, dengan menggunakan kriteria miskin pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan kepemilikan dokumen kependudukan, pada tahun 2006 terdapat 124.706 jiwa penduduk dengan kategori miskin.

Tabel.3.2. Jumlah Penduduk Miskin Kota Depok Tahun 2006

No.	KECAMATAN	KK	JIWA
1	SAWANGAN	5.173	21.235
2	PANCORANMAS	6.496	28.232
3	SUKMAJAYA	5.148	23.642
4	CIMANGGIS	7.576	30.702
5	BEJI	2.595	11.044
6	LIMO	2.455	9.851
	JUMLAH	29.443	124.706

(Sumber : hasil Pemetaan Penduduk Miskin Th 2006)

Untuk angka pengangguran, pada tahun 2004 angka pengangguran terbuka mencapai 15,79 % dari jumlah angkatan kerja sebanyak 555.751 jiwa dan pada tahun 2005 sebesar 12,31 % dari jumlah angkatan kerja sebanyak 617.288 jiwa. Beberapa penyebab diantaranya adalah : tidak seimbangnya antara kapasitas lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja, dan rendahnya keterampilan dan keahlian para pencari kerja sehingga kurang sesuai dengan pasar kerja. Pada tahun 2008, diprediksi bahwa persaingan untuk memasuki pasar kerja akan

semakin tinggi, hal ini disebabkan oleh faktor eksternal (migrasi yang cukup tinggi) dan faktor internal (bertambahnya angkatan kerja baru, pertumbuhan lapangan kerja relatif rendah).

3.2.2. Kemacetan dan transportasi

Berdasarkan hasil identifikasi, Depok memiliki 36 titik kemacetan, yang terdiri dari 22 ruas jalan dan 14 simpul/persimpangan. Pada umumnya kemacetan di Kota Depok disebabkan oleh terbatasnya kapasitas jalan, ruas jalan yang ada pada saat ini terdiri dari jalan nasional 28,5 km, jalan provinsi 26,15 km dan jalan kota 328,72 km (19,35% kondisi baik, 74,45% kondisi sedang, 6,2% kondisi rusak). Disamping itu terdapat masalah tingginya pergerakan penduduk ke luar Depok (DKI Jakarta), penggunaan *moda sepeda motor (60%-70%), mobil pribadi (10%-30%),* kinerja lalu lintas tinggi dengan *V/C ratio* melebihi 0,8 dan *load factor* tinggi.

Dari faktor-faktor diatas, kemacetan terjadi hampir pada semua ruas jalan yang ada, terutama pada jam-jam sibuk (*peak hours*) di pagi dan sore hari. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya tenaga pengatur lalu lintas di tiap titik kemacetan, kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas, kurangnya rambu-rambu lalu lintas pada daerah/kawasan tertentu dan kurangnya kesadaran para pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Untuk tahun 2008 diprediksi kemacetan akan terus bertambah jika tidak diintervensi oleh program dan kegiatan yang tepat, mengingat pertumbuhan penduduk dan kendaraan akan tetap lebih tinggi dibanding dengan perbaikan infrastruktur. Untuk tahun 2008 direncanakan akan diselesaikan 4 (empat) lokasi kemacetan, yaitu : simpang Jl.Tole Iskandar – Jl. Kemakmuran, simpang Jl.Tole Iskandar- Raden Saleh, simpang RTM-Akses UI dan Cinere Segmen I.

3.2.3. Pendidikan

Meskipun IPM Kota Depok (data BPS tahun 2005) pada bidang pendidikan menunjukkan angka yang relatif baik, yaitu : 97,98 %, pada Angka Melek Huruf (AMH) dan 10,61 tahun pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS), namun bidang pendidikan masih menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya masih terdapat penduduk Kota Depok yang masih dalam kategori buta aksara latin sebanyak 20.273 orang pada tahun 2006 dan al-qur'an sebanyak 36.491 orang pada tahun 2006 (data hasil survei Dinas Pendidikan Kota Depok).

Selain itu terdapat pula beberapa permasalahan yang masih perlu mendapatkan pemecahan, diantaranya : masih tingginya biaya pendidikan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat, terbatasnya kompetensi guru, terbatasnya kualitas output pendidikan dan terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan. Pada tahun 2008, seiring dengan perkembangan kota, terutama biaya pendidikan diprediksi akan tetap tinggi, sementara sarana dan prasarana pendidikan juga masih terbatas.

3.2.4. Kesehatan

Meskipun Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Depok cukup tinggi (72,97 tahun), namun Kota Depok masih menghadapi berbagai permasalahan di Bidang Kesehatan, diantaranya : angka kesakitan seperti penyakit DBD sebesar 2,8 CFR, diare sebanyak 26 kasus per 1000 orang, ISPA sebanyak 0,071 kasus/100.000 orang, TB Paru sebesar 64 kasus dan filariasis sebanyak 5 kasus klinis. Pada tahun 2006 walaupun terjadi penurunan pada penyakit DBD sebesar 0,65 CFR dan Diare sebanyak 19,63 kasus per 1.000 orang, namun masih terdapat peningkatan angka kesakitan pada penyakit ISPA sebanyak 5,92 kasus/100.000 orang, TB Paru sebanyak 83 kasus dan filariasis sebanyak 6 kasus klinis. Selain itu terdapat 9.235 balita kurang gizi dan 935 balita penderita gizi buruk; masih terdapatnya Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2004 sebesar 8 jumlah kematian dan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2005 sebesar 27,17 per 1000 lahir hidup.

Berbagai intervensi program dan kegiatan di bidang kesehatan lebih diarahkan pada hal-hal sebagai berikut: (a) Mempertahankan IMR yang sudah rendah dan berusaha untuk menurunkannya; (b) Mempertahankan AHH yang sudah tinggi dan berusaha untuk meningkatkannya; (c) Menurunkan beban biaya kesehatan bagi penduduk miskin; (d) Membangun dan melengkapi sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas dan RSD.

3.2.5. Pelayanan Publik

Setiap warga masyarakat berhak mendapatkan pelayanan secara baik, adil, transparan dan akuntabel. Kondisi ini mendorong perubahan paradigma dalam pelayanan pemerintahan, dari semula sangat birokratis menjadi lebih sederhana dan dari fungsional menjadi lebih terpadu. Fakta menunjukkan masih terdapatnya pengaduan masyarakat sebagai pengguna layanan atas ketidakpuasan dari produk layanan yang diterima, seperti kurang transparannya prosedur, tingginya biaya pelayanan dan lamanya waktu pelayanan.

Untuk tahun 2007 kinerja pelayanan publik diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Upaya untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM Pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, peningkatan manajemen pelayanan dan pembentukan pelayanan terpadu satu pintu yang secara operasional akan dilakukan pada tahun 2008. Pendekatan yang digunakan adalah “ *one roof service* ” dan “ *one permit for all* ”.

3.2.6. Persampahan

Hingga akhir tahun 2006 pengelolaan sampah di Kota Depok masih dirasakan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh tidak sebandingnya jumlah volume sampah dengan kapasitas pengangkutan sampah, sehingga terjadi penumpukan sampah. Berdasarkan data, pada tahun 2005 jumlah volume sampah perhari sebesar 3.000 m³ sedangkan yang terangkut 1.320 m³ (44 %), dan pada tahun 2006 jumlah volume sampah sebesar 3.200 m³ per hari sedangkan yang terangkut sebesar 1.752 m³ (54,74 %). Diharapkan pada tahun 2007 pengelolaan sampah dapat

ditingkatkan, melalui optimalisasi kinerja TPA dan pengelolaan sampah di TPS melalui penyediaan Unit Pengolahan Sampah (UPS). Demikian pula untuk tahun 2008 penyelesaian masalah persampahan akan ditempuh melalui upaya efisiensi kinerja TPA Cipayung dan melaksanakan pengelolaan sampah pada sumbernya melalui Unit Pengolahan Sampah (UPS) dengan target minimal di 10 lokasi.

Tabel.3.3. Proyeksi Timbulan Sampah Kota Depok (2005-2010)

	Satuan	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Domestik							
Timbulan total	m3/hr	455	791	1.24	1.726	2.253	2.823
Total sampah terangkut	m3/hr	360	601	892	1.105	1.261	1.355
Pasar							
Timbulan total	m3/hr	149	149	149	149	149	149
Total sampah terangkut	m3/hr	118	113	107	95	83	72
Penyapuan Jalan (Jalur)							
Timbulan Total	m3/hr	211	211	211	211	211	211
Total sampah terangkut	m3/hr	167	160	152	135	118	101
Komersil							
Timbulan total	m3/hr	109	190	297	414	541	677
Total sampah terangkut	m3/hr	86	144	214	265	303	325
Total							
Timbulan Total	m3/hr	924	1.341	1.897	2.5	3.153	3.86
Total Sampah Terangkut	m3/hr	732	1.019	1.366	1.6	1.766	1.853

Sumber: Studi LES (local Environmental Strategy) 2004

3.2.7. Pengendalian Tata Ruang

Berkaitan dengan aspek pengendalian dan pemanfaatan ruang, saat ini terjadi peningkatan penggunaan lahan dan alih fungsi lahan di Kota Depok. Perkembangan yang terjadi menunjukkan terdapatnya kecenderungan adanya alih fungsi lahan dari kegiatan pertanian menjadi kegiatan budidaya perkotaan (perdagangan & jasa, permukiman, dan sebagainya) yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan kurang memperhatikan daya dukung lingkungan. Hal ini diindikasikan oleh berkurangnya kawasan lindung, peningkatan konversi lahan sawah, dan munculnya kerusakan lingkungan.

Masalah ini dipengaruhi oleh : kurangnya penegakan regulasi, masih lemahnya data tentang bangunan/gedung, belum adanya mekanisme yang mengatur proses **pengendalian pemanfaatan ruang** (pelaporan, pengawasan maupun penertiban), lemahnya koordinasi lintas instansi & penegakan hukum/aturan yang sementara ini telah ada.

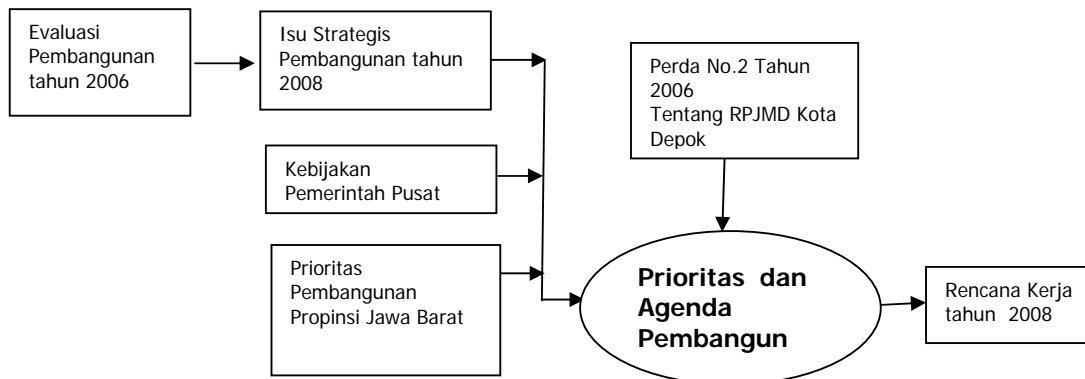
Salahsatu akibat yang ditimbulkan dari kurang terkendalinya pemanfaatan ruang adalah terjadinya banjir. Ditambah dengan kurangnya penataan drainase dan Daerah Aliran Sungai (DAS), belum termanfaatkannya situ sebagai kawasan resapan air, banyaknya lahan-lahan kritis, serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah banjir.

3.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah yang menjadi dasar penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2008 disusun berdasarkan isu strategis pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Depok Tahun 2006 – 2011 dan beberapa arahan RKP serta RKPD Propvinsi Jawa Barat.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah serta memberikan arahan yang lebih jelas bagi perencanaan pembangunan yang lebih rinci maka masing-masing prioritas pembangunan daerah dilengkapi dengan agenda pembangunan. Proses penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2008 dilakukan berdasarkan bagan alir pada gambar 3.4.

Gambar 3.4. Bagan Alir Penetapan Prioritas Pembangunan Daerah



Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Depok tahun 2008 merupakan penjabaran dari Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2006-2011 dengan memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat sebagaimana terdapat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat (RKPD) Provinsi tahun 2008, yaitu 15 (lima belas) prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008, yaitu :

1. Peningkatan Aksesibilitas, Kualitas, dan Tata Kelola Pendidikan
2. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Daerah
3. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan Masyarakat
4. Pemberdayaan Penduduk Miskin
5. Peningkatan Kompetensi dan Perlindungan Ketenagakerjaan

6. Peningkatan Peran KUKM dan IKM
7. Peningkatan Peluang Investasi Untuk Perluasan Kesempatan Kerja
8. Revitalisasi Agribisnis dan Agroindustri
9. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah
10. Peningkatan Ketahanan Energi
11. Optimalisasi Penanganan Bencana, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
12. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk
13. Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
14. Pemantapan Manajemen Pemerintahan Daerah
15. Pemantapan Stabilitas Politik

Adapun target Indikator Makro Kota Depok sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2006-2011, meliputi : peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 2,5 % , mengurangi titik kemacetan minimal 2 titik, mengurangi titik banjir pada 1 lokasi, bertambahnya cakupan pelayanan sambungan air bersih 1400 SR, bertambahnya unit pengolahan sampah pada 10 lokasi, penataan kawasan kumuh pada 3 lokasi, meningkatnya LPE 6,47 meningkatnya pendapatan asli daerah, dan meningkatnya indikator Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78,88 (Indeks Kesehatan 73,72, Indeks Pendidikan 69,13, Indeks Daya Beli 609,58).

Untuk merealisasikan pencapaian target indikator makro kota tahun 2008 dan upaya untuk mengeliminir isu strategis, diperlukan penentuan prioritas pembangunan agar alokasi sumberdaya bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Berdasarkan beberapa analisis terhadap permasalahan kota dan RPJMD, prioritas pembangunan tahun 2008 meliputi :

- I. Penanggulangan kemiskinan dan Peningkatan Daya Beli.

Agenda :

1. Memberdayakan Penduduk Miskin

Program :

- Penyelenggaraan jaminan sosial
- Pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera
- Penataan lingkungan pemukiman

2. Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Program :

- Peningkatan produktifitas usaha koperasi dan UKM
- Pengembangan dan penataan pasar tradisional
- Peningkatan daya tarik investasi
- Peningkatan kualitas ketenagakerjaan
- Pengembangan usaha industri rumah tangga, kecil dan menengah

- Pengembangan usaha perdagangan dan jasa
- Pengembangan agribisnis perkotaan
- Peningkatan pendapatan daerah
- Pengembangan obyek wisata
- Perlindungan ketenagakerjaan

II. Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas

Agenda :

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi

Program :

- Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
- Pengembangan moda transportasi

2. Menegakan Ketertiban dan Keamanan Sarana Transportasi

Program :

- Peningkatan tertib sosial
- Pengembangan manajemen transportasi.

III. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan

Agenda : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Program :

- Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah baik jalur sekolah dan luar sekolah.
- Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
- Peningkatan peran serta masyarakat/swasta dalam penyelenggaraan pendidikan.
- Peningkatan prestasi olahraga

IV. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

Agenda :

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Program :

- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi
- Penanganan penyakit menular dan tidak menular
- Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar
- Penyelenggaraan promosi kesehatan

- Peningkatan jangkauan layanan air bersih
- Peningkatan pelayanan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan.

2. Mengembangkan Kota Siaga

Program :

- Penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan keluarga

V. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Agenda :

1. Melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program :

- Peningkatan integrasi pelayanan

2. Meningkatkan Manajemen Pelayanan Publik

Program :

- Peningkatan manajemen pelayanan
- Peningkatan jangkauan pelayanan
- Peningkatan kualitas SDM pemerintahan daerah melalui diklat struktural dan fungsional
- Peningkatan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan
- Peningkatan kualitas pengawasan
- Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peningkatan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa
- Peningkatan peran dan fungsi legislatif
- Pengelolaan dan pengembangan aset daerah
- Peningkatan kualitas produk hukum daerah
- Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan
- Peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen kependudukan
- Pengembangan kearsipan perpustakaan dan telematika
- Peningkatan kerjasama antar lembaga.

VI. Peningkatan Kualitas Layanan Persampahan

Agenda :

1. Meningkatkan manajemen persampahan di TPA.

Program :

- Peningkatkan manajemen pengelolaan persampahan di TPA

2. Meningkatkan Manajemen Persampahan di TPS

Program :

- Peningkatkan manajemen pengelolaan persampahan di TPS

VII. Pengendalian Tata Ruang

Agenda :

1. Meningkatkan dan Menegakkan Regulasi Tata Ruang

Program :

- Perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang dan bangunan

2. Memelihara Kawasan Lindung dan Situ serta pemulihan pasca bencana.

Program :

- Pengendalian banjir
- Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup
- Penanggulangan bencana

Selain prioritas pembangunan sebagaimana diuraikan diatas, terdapat beberapa agenda pembangunan yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial, politik dan kemasyarakatan. Program-program terkait hal tersebut adalah : peningkatan kualitas kehidupan beragama, peningkatan kualitas kehidupan politik, pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan, peningkatan pembinaan generasi muda dan olahraga, peningkatan pelestarian seni dan budaya. Selanjutnya terdapat pula beberapa program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sehubungan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2008 disusun berdasarkan pada isu strategis, pelaksanaan RPJMD dan prioritas pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah sebagaimana tersebut dalam Bab III telah diidentifikasi sebanyak 7 (tujuh) prioritas pembangunan, yaitu :

1. Penanggulangan Penduduk Miskin dan Peningkatan Daya Beli;
2. Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas;
3. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan;
4. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan;
5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik;
6. Peningkatan Kualitas Layanan Persampahan;
7. Peningkatan Kualitas Pengendalian Tata Ruang.

Selain prioritas pembangunan sebagaimana diuraikan diatas, terdapat beberapa agenda pembangunan yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial, politik dan kemasyarakatan, serta beberapa program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.1 MATRIKS RENCANA KERJA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Program dan kegiatan Rencana kerja prioritas pembangunan Kota Depok tahun 2008 dijelaskan pada lampiran I.

BAB V

ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Anggaran pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2008 merupakan gambaran tentang anggaran pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Anggaran pembangunan daerah tersebut berasal dari berbagai sumber pendanaan, antara lain : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok, APBD Propinsi Jawa Barat dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

5.1. KERANGKA ANGGARAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta pedoman teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, ditegaskan bahwa pelaksanaan APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi. Oleh sebab itu pelaksanaan APBD harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.

5.1.1. Kondisi APBD

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sedangkan Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sementara Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Untuk pajak daerah terdiri dari 6 jenis pajak (pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PJU dan parkir). Sedangkan retribusi daerah terdapat 27 jenis retribusi. Hasil pengelolaan kekayaan daerah bersumber dari 2 pos, yaitu bagian laba PDAM dan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Jabar, sedangkan lain-lain pendapatan yang sah terdapat 5 jenis.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok selama 5 tahun (2003-2007) dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya mengalami kenaikan sebesar 15,49 % dan kontribusinya terhadap APBD rata-rata per tahun adalah berkisar sebesar 10,44 %. Berikut ini disajikan tabel perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok.

Tabel. 5.1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah APBD Kota Depok Tahun 2003-2007

NO	TAHUN	PAD	Pertumbuhan (%)	APBD	Proporsi (%)
1	2003	41.165.629.524,00		393.162.362.119,02	10,47
2	2004	49.916.768.407,91	21,26	470.271.615.877,00	10,61
3	2005	64.060.869.668,97	28,34	534.250.694.945,27	11,99
4	2006	65.149.151.766,85	1,70	595.569.467.747,91	10,94
5	2007	72.079.618.619,05	10,64	881.441.384.665,65	8,18
Rata-rata per tahun			15,49		10,44

Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2003-2007

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Kota Depok selama 5 tahun terakhir (2003-2007) pertumbuhannya rata-rata per tahun adalah sebesar 12,25% dan kontribusi terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama adalah rata-rata sebesar 75,49 %. Berikut ini disajikan tabel mengenai perkembangan Dana Perimbangan Kota Depok selama 5 tahun :

Tabel. 5.-2. Perkembangan Dana Perimbangan APBD Kota Depok Tahun 2003-2007

NO	TAHUN	Dana Perimbangan	Pertumbuhan (%)	APBD	Proporsi (%)
1	2003	315.103.996.476,00		393.162.362.119,02	80,15
2	2004	378.848.440.072,41	20,23	470.271.615.877,00	80,56
3	2005	415.229.467.888,00	9,60	534.250.694.945,27	77,72
4	2006	493.318.004.764,00	18,81	595.569.467.747,91	82,83
5	2007	495.090.160.151,00	0,36	881.441.384.665,65	56,17
Rata-rata per tahun			12,25		75,49

Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2003-2007

Dari tabel di atas terlihat bahwa Dana Perimbangan merupakan porsi terbesar dalam sumber penerimaan APBD Kota Depok, atau dengan kata lain menunjukkan tingkat ketergantungan Pemerintah Kota terhadap penerimaan Dana Perimbangan khususnya terhadap Dana Alokasi Umum (DAU).

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah Kota Depok selama 5 tahun terakhir (2003-2007) pertumbuhannya rata-rata per tahun mengalami kenaikan 1321,32 % , kenaikan ini disebabkan karena kenaikan lain-lain pendapatan yang sah mengalami kenaikan Rp. 160.664.384.059,31 atau sebesar 5355,48 % dari tahun 2006, dan kontribusi terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama rata-rata sebesar 5,45 %. Berikut ini disajikan tabel mengenai perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah Kota Depok.

Tabel 5.3. Perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah APBD Kota Depok Tahun 2003-2006

NO	TAHUN	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Pertumbuhan (%)	APBD	Kontribusi (%)
1	2003	13.408.374.000,00		393.162.362.119,02	3,41
2	2004	10.411.099.000,00	22,35	470.271.615.877,00	2,21
3	2005	13.533.200.000,00	29,99	534.250.694.945,27	2,53
4	2006	3.000.000.000,00	77,83	595.569.467.747,91	0,50
5	2007	163.664.384.059,31	5355,48	881.441.384.665,65	18,57
Rata-rata per tahun			1321,32		5,45

Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2003-2007

Total pendapatan Kota Depok yaitu penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah dalam kurun waktu 2003-2006 mengalami peningkatan sebesar 18,78% per tahun dan kontribusinya terhadap APBD adalah sebesar 91,37% per tahun, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.4. Perkembangan Pendapatan APBD Kota Depok Tahun 2003-2007

NO	TAHUN	PENDAPATAN	Pertumbuhan (%)	APBD	Kontribusi (%)
1	2003	369.678.000.000,00		393.162.362.119,02	94,03
2	2004	439.176.307.480,32	18,80	470.271.615.877,00	93,39
3	2005	492.823.537.556,97	12,22	534.250.694.945,27	92,25
4	2006	561.467.156.530,85	13,93	595.569.467.747,91	94,27
5	2007	730.834.162.829,36	30,17	881.441.384.665,65	82,91
Rata-rata per tahun			18,78		91,37

Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2003-2007

5.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil (output dan outcome) dari input yang direncanakan, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Perkembangan Belanja Daerah Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.5. Perkembangan Belanja APBD Kota Depok Tahun 2003-2007

NO	TAHUN	BELANJA	PERTUMBUHAN (%)	APBD	PROPORSI (%)
1	2003	381.142.138.819,02		393.162.362.119,02	96,94
2	2004	463.568.481.368,00	21,63	470.271.615.877,00	98,57
3	2005	527.366.694.945,27	13,76	534.250.694.945,27	98,71
4	2006	581.345.467.747,91	10,24	595.569.467.747,91	97,61
5	2007	868.425.904.665,65	49,38	881.441.384.665,65	98,52
Rata-rata per tahun			18,35		78,68

Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2003-2007

Berdasarkan Pasal 36 Permendagri No. 13 tahun 2006, Belanja Daerah dikelompokkan atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Perkembangan Belanja Daerah Kota Depok selama kurun waktu 5 tahun (2003-2007) yaitu rata-rata pertumbuhan per tahun belanja SKPD mengalami kenaikan sebesar 21,42%; belanja bagi hasil dan bantuan

keuangan turun sebesar 3,14%, dikarenakan pada tahun 2007 terdapat belanja hibah dan belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga naik sebesar 313,24%. Sedangkan proporsi masing-masing belanja terhadap total belanja rata-rata per tahun belanja SKPD memiliki porsi 87,37%; belanja hibah 0,16%; belanja bantuan sosial 1,70%; belanja bagi hasil dan bantuan keuangan memiliki porsi 7,52% dan belanja tidak terduga memiliki porsi 1,33%, perkembangannya sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 5.6. Perkembangan Rincian Belanja APBD Kota Depok Tahun 2003-2007

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN					Rata2 Pertum- buan (%)	Rata 2 Prop- orsi (%)
		2003	2004	2005	2006	2007		
	BELANJA	381.142.138.819,02	463.568.481.368,00	527.366.694.945,27	581.345.467.747,91	868.425.904.665.65	23,75	98,07
1	Belanja SKPD	345.171.129.396,02	414.028.522.217,00	464.293.194.787,75	536.467.794.748	740.662.700.273,05	21,42	87,37
2	Belanja Hibah					7.000.000.000,00		0,16
3	Belanja Bantuan Sosial					74.963.920.000,00		1,70
4	Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	34.621.009.423,00	48.292.464.200,00	48.154.906.600,00	38.848.423.000	26.250.000.000,00	(3,14)	7,52
5	Belanja Tidak terduga	1.350.000.000,00	1.247.494.951,00	14.918.593.557,52	6.029.250.000	19.549.284.392,60	313,24	1,33

Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2003-2007

5.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perkembangan pembiayaan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 48,57 % per tahun, sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 5.7. Perkembangan Pembiayaan APBD Kota Depok Tahun 2003-2006

TAHUN	PEMBIAYAAN		SURPLUS (DEFISIT)	PERTUM- BUHAN (%)
	PENERIMAAN	PENGELUARAN		
2003	23.484.362.119,02	12.020.223.300,00	11.464.138.819,02	
2004	31.095.308.396,68	6.703.134.509,00	24.392.173.887,68	112,77
2005	41.427.157.388,30	6.884.000.000,00	34.543.157.388,30	41,62
2006	34.102.311.217,06	14.224.000.000,00	19.878.311.217,06	(42,45)
2007	150.607.221.836,29	13.015.480.000,00	137.591.741.836,29	71,56
Rata-rata Pertumbuhan				48,57

Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2003-2007

5.2 KEBIJAKAN ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen kebijakan publik yang memuat pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, yang mengacu pada norma dan prinsip anggaran, yaitu :

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, bahwa penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik.
2. Disiplin Anggaran, bahwa pelaksanaan program dan kegiatan harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak diperkenankan melakukan pengeluaran diluar pos anggaran yang telah ditetapkan.
3. Keadilan anggaran, bahwa APBD harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh layanan publik sesuai dengan prioritas kebutuhan.
4. Efisiensi dan efektifitas anggaran, bahwa anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan produk layanan secara maksimal.

5.2.1 Kebijakan Anggaran Pendapatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah;
- b. Dana Perimbangan, meliputi : dana bagi hasil (yang bersumber dari pajak dan dari sumberdaya alam), dana alokasi umum dan dana alokasi khusus;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan Umum pendapatan daerah tahun 2008 adalah meningkatkan kemampuan penerimaan keuangan daerah dari semua jenis penerimaan terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meningkatkan pendapatan daerah tahun 2008, maka strategi dan prioritas pencapaiannya dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penerimaan PAD pada tingkat pencapaian 5 % dibandingkan tahun sebelumnya;
- b. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan lainnya melalui :
 - Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
 - Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
 - Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.
 - Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

5.2.2. Kebijakan Anggaran Belanja

Anggaran Belanja Daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kewajiban daerah dalam memberikan penyediaan layanan publik dan layanan sipil (pemenuhan hak-hak dasar warga masyarakat). Dalam penyusunannya didasarkan pada kemampuan anggaran dan standar harga, dengan memperhatikan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai. Selanjutnya alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus diikuti dengan rencana capaian kinerja pelayanan dan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai.

5.2.3. Kebijakan Anggaran Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan mengindikasikan akan terjadinya defisit pendapatan, dengan indikasi belanja lebih besar dari pendapatan, khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Defisit anggaran ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip penyusunan anggaran sepanjang selisih kurang tersebut dapat ditutupi melalui pembiayaan. Oleh sebab itu kebijakan pembiayaan akan mengupayakan jumlah pembiayaan sama dengan jumlah defisit anggaran yang ada, dengan mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan, antara lain : Sisa lebih perhitungan anggaran, Dana cadangan, Penjualan aset daerah yang dipisahkan, Pinjaman daerah atau Penerbitan obligasi sehingga dapat diupayakan anggaran yang berimbang.

BAB VI

PENUTUP

Sesuai amanat Undang-undang, RKPD merupakan pedoman untuk menyusun rancangan APBD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok tahun 2008 memuat isu startegis, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan indikasi pendanaan.

Dalam prosesnya RKPD disusun melalui pendekatan participatory planning, yang dilaksanakan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan melibatkan seluruh stakeholder kota. Berdasarkan analisis terhadap seluruh aspek pembangunan maka ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008, dengan penambahan beberapa program yang bersifat rutin.

Selanjutnya dalam pelaksanaan RKPD 2008 diperlukan langkah-langkah taktis strategis. Beberapa kaidah pelaksanaan yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota berkewajiban untuk melaksanakan program-program/kegiatan-kegiatan dalam RKPD tahun 2008, dengan sebaik-baiknya.
2. Sebagai pedoman penyusunan RAPBD, RKPD perlu dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kota Depok dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA).
3. Dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus membuat Rencana Kerja yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum SKPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
5. Masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat berperan serta dalam pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan (kontrol sosial).
6. Pada akhir tahun anggaran 2008, setiap Kepala SKPD wajib melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

RKPD Kota Depok Tahun 2008, berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2008. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan.

WALIKOTA DEPOK

ttd

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

